

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang menyerang sistem pernafasan, kasus ini pertama kali terjadi di Kota Wuhan, China dengan 27 kasus terkonfirmasi di akhir tahun Desember 2019⁽¹⁾. Pada 17 September 2021, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia mencapai 226.844.344, wilayah terdampak mencapai 204 negara dan 151 di antaranya termasuk negara dengan penularan komunitas. Hal ini juga semakin serius dan perlu mendapat perhatian yang mendesak karena pada 21 September telah terjadi 4.697.314 kematian⁽²⁾⁽³⁾. Pesatnya penyebaran dan peningkatan kasus mendorong WHO sebagai organisasi kesehatan dunia untuk menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pandemi⁽⁴⁾.

Indonesia menempati urutan ke-13 dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di dunia, semua provinsi terkena dampak COVID-19. Hingga 03 Juni 2022, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 6.056.800 kasus terkonfirmasi COVID-19. Ada 156.615 kematian terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 5.896.548 pasien telah pulih dari penyakit ini, saat ini Indonesia termasuk dalam transmisi komunitas⁽⁵⁾.

Saat ini, pemerintah mulai melonggarkan pembatasan terkait pencegahan pandemi Covid-19 dengan mengizinkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Ada beberapa pengecualian yang mewajibkan seseorang untuk memakai masker, yakni jika melakukan aktivitas di ruangan tertutup dan di angkutan public atau kendaraan umum. Masker tetap wajib bagi masyarakat rentan seperti

lansia, memiliki penyakit penyerta, ibu hamil dan anak-anak yang belum divaksinasi, serta bagi mereka yang memiliki gejala batuk, pilek, dan demam. Kelompok-kelompok ini tetap diwajibkan memakai masker untuk melindungi diri dari penularan. Kemudian bagi yang memiliki gejala batuk, bersin, sebaiknya tetap menggunakan masker⁽⁶⁾.

Pada tanggal 10 Juni 2022 subvarian baru Omicron BA.4 dan BA.5 telah terdeteksi di Indonesia. Subvarian tersebut diketahui memiliki tingkat kesakitan rendah pada pasien yang terkonfirmasi positif. Ada 4 kasus subvarian baru BA.4 dan BA.5 pertama yang dilaporkan di Indonesia pada 6 Juni 2022. 4 kasus itu terdiri dari 1 orang positif BA.4 seorang WNI dengan kondisi klinis tidak bergejala serta sudah melakukan vaksinasi dua kali. Selebihnya 3 orang kasus positif BA.5. Mereka merupakan pelaku perjalanan luar negeri delegasi pertemuan the Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali pada 23 sampai 28 Mei. Pada tingkat global secara epidemiologi subvarian BA.4 sudah dilaporkan sebanyak 6.903 sekuens melalui GISAID. Sedangkan BA.5 sudah dilaporkan sebanyak 8.687 sekuens dari 63 negara. Transmisi BA.4 maupun BA.5 memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat dibandingkan subvarian omicron BA.1 dan BA.2. Di Indonesia jumlah kasus subvarian baru yakni BA.4 dan BA.5 bertambah menjadi 143 kasus per 23 Juni 2022. Rinciannya BA.4 20 kasus dan 123 kasus BA.5. Total kasus BA.4 dan BA.5 yang telah diidentifikasi 143 kasus. Saat ini November 2022 virus varian baru juga sudah muncul kembali setelah BA.4 dan BA.5 yaitu varian XBB, bahkan Indonesia juga sudah terdeteksi, penyebab kasus naik adalah telah longgarnya penerapan protocol kesehatan, dengan munculnya varian baru ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 dan 48 Tahun 2022 yang menetapkan seluruh wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali kembali berada pada status PPKM level 1. ⁽⁷⁾.

Dalam hal ini, perlu dipahami dan disadari bahwa di masa krisis kesehatan yang sedang dialami negara kita, penerapan protokol kesehatan menjadi sangat penting ketika setiap orang harus memulai fase “New Normal” dalam menghadapi COVID-19⁽⁸⁾. Berbagai macam upaya pencegahan dan penanganan serta pengendalian terus dilakukan guna menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah telah memilih Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang belum terselesaikan, dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan status kesehatan sambil memperbaiki kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini mendukung produktivitas dan pelaksanaan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Agar tetap aman dari COVID-19, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. AKB mengatur protokol kesehatan untuk semua kegiatan, baik di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, pariwisata, bahkan transportasi.⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾

Dalam pelaksanaan AKB tidak sedikit permasalahan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. AKB belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan penelitian Santoso, dkk (2021) diketahui bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang siap dengan Adaptasi Kebiasaan baru ini, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum terbiasa dalam menerapkan protokol kesehatan yang dijelaskan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru. Dalam hal ini masih banyak orang yang merasa takut saat melaksanakan Adaptasi Kebiasaan baru ini dan malah mengira justru menyebabkan mereka tertular COVID-19⁽¹⁰⁾. Pada Penelitian Fadhila, dkk (2020) menemukan bahwa masyarakat Indonesia belum melakukan AKB saat beraktivitas di luar rumah, dari 2.236 responden penelitian, 49,8% responden belum mematuhi dan melanggar protokol kesehatan⁽¹¹⁾. Selain itu, permasalahan penerapan AKB juga terjadi di sektor transportasi. Melalui penelitian Supriyatno

(2021) setelah dilakukan observasi di terminal angkutan umum Sidoarjo-Surabaya ternyata masih terdapat pelanggaran pembatasan kegiatan transportasi dengan melanggar protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak, hal ini dilanggar karena pembatasan hasil kapasitas angkut kecil dan menurun⁽¹²⁾. Penelitian toyfur, dkk (2020) juga menjelaskan bahwa untuk penumpang angkutan umum di terminal Alang Alang Lebar Palembang hanya 37% penumpang yang patuh, 44% kadang-kadang patuh, 20% tidak pernah patuh. Pada umumnya masyarakat sudah memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan, umumnya hal ini terjadi karena kelupaan. Protokol kesehatan yang sering dilanggar adalah tidak menjaga jarak aman saat berada di transportasi umum⁽¹³⁾.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Sumatera Barat) merumuskan Perda (Peraturan Daerah) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona 2019, serta memperjelas dan mempertegas pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di wilayah Sumatera Barat. Peraturan ini merupakan bentuk langkah maju untuk menyelesaikan masalah akibat COVID-19 yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan⁽⁹⁾.

Berdasarkan wawancara dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, peningkatan signifikan kasus COVID-19 justru terjadi sejak penerapan AKB, terlebih saat akses Kota Bukittinggi dibuka, terutama masa libur dan akhir tahun, didapati data dari laporan surveilans epidemiologi covid-19 per 24 Agustus 2022 terkonfirmasi 535 kasus, berdasarkan temuan dilapangan setelah dilakukan pengamatan selama 1 minggu dengan menaiki angkutan umum 15 kali setiap pagi, siang, sore, didapati bahwa rata-rata pengguna angkutan umum tidak menggunakan masker, saat melakukan observasi di pagi hari

pada angkutan umum, rata-rata penumpang adalah anak sekolah, setelah diamati dalam 1 angkutan umum yang berisi 13 orang saat itu hanya 3 orang yang memakai masker, selebihnya tidak memakai masker, serta mengabaikan jarak aman, pengguna angkutan umum Kota Bukittinggi juga sering tetap naik angkutan umum walaupun sudah penuh dan sesak. Padahal sudah jelas tertulis dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 bahwa kapasitas angkut mobil penumpang adalah 50% dari kapasitas angkut, belum terlihat kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya untuk menerapkan AKB, begitupun dengan sopir angkutan umum tersebut juga tidak memakai masker dan tidak menegur penumpang yang tidak memakai masker serta membiarkan angkot tersebut terisi dengan penuh dan sesak, dengan itu didapati bahwa terdapat permasalahan dalam pengimplementasian dari perda AKB dalam bidang transportasi.

Menurut George C. Edward III, permasalahan yang terjadi terkait implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teori ini mudah dipahami dan cocok untuk mengukur sebuah keberhasilan dari suatu kebijakan. Komunikasi yang baik dapat mempermudah implementasi kebijakan, komunikasi menjadi kegiatan penyampaian pesan atau arahan terkait kebijakan terhadap implementator. Sumber daya merupakan komponen yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti jumlah staff, kecukupan informasi dan juga fasilitas. Disposisi merupakan karakter yang dapat mempengaruhi implementator dalam mengimplementasikan kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan, aspek struktur birokrasi mencakup 2 hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penulis tertarik untuk mengetahui tentang implementasi Kebijakan AKB di bidang transportasi di Kota Bukittinggi⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Bidang Transportasi Angkutan Umum Kota Bukittinggi”.

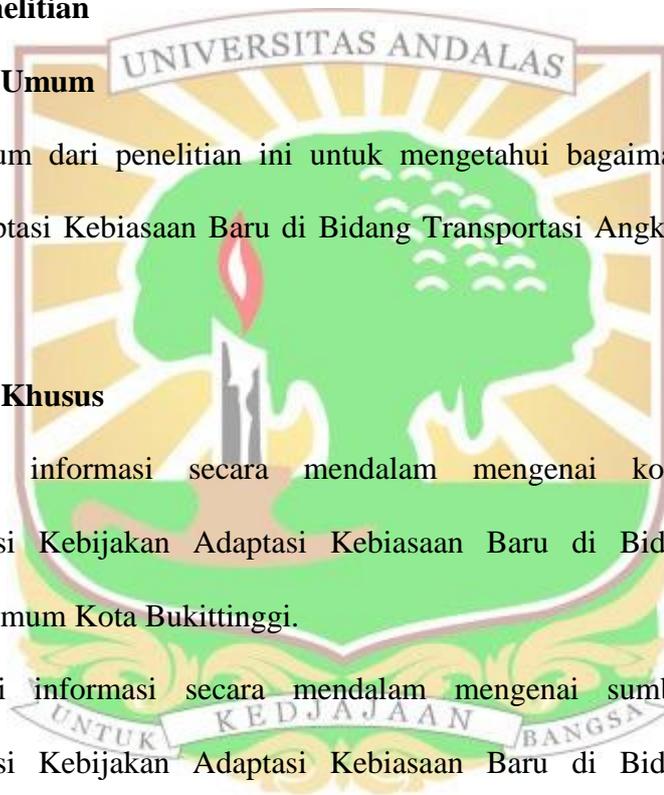
1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Bidang Transportasi Angkutan Umum Kota Bukittinggi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui informasi secara mendalam mengenai komunikasi dalam implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Bidang Transportasi Angkutan Umum Kota Bukittinggi.
2. Mengertahui informasi secara mendalam mengenai sumber daya dalam implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Bidang Transportasi Angkutan Umum Kota Bukittinggi.
3. Mengetahui informasi secara mendalam mengenai disposisi atau sikap dalam implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Bidang Transportasi Angkutan Umum Kota Bukittinggi.
4. Mengetahui informasi secara mendalam mengenai struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Bidang Transportasi Angkutan Umum Kota Bukittinggi.



5. Mengetahui informasi secara mendalam mengenai implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Bidang Transportasi Angkutan Umum Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kemampuan, pengalaman peneliti dan menjadi sarana belajar bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan analisis masalah serta sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan pada bangku perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat dan dapat memberikan informasi dimana dapat meningkatkan pengetahuan para akademis terkait bidang keilmuan kesehatan masyarakat,

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan monitoring pemaksimalan implementasi Peraturan Daerah mengenai AKB yang merupakan salah satu cara mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Kota Bukittinggi, khususnya pada bidang transportasi. Melalui penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi, dan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi untuk menyusun rencana aksi atau rencana tindak lanjut dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di bidang transportasi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang Transportasi Angkutan Umum Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode implementasi kebijakan dari George C.Edward III dan mencari tahu proses implementasi Peraturan Daerah mengenai AKB, khususnya dibidang transportasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, informan dari penelitian ini ditetapkan berdasarkan purposive sampling, merupakan implementor yang terlibat dalam menyukseskan implementasi Kebijakan mengenai AKB ini di bidang transportasi Kota Bukittinggi.

